

MASA DEPAN ANAK MUDA PERTANIAN

Ahmad Nashih Luthfi¹ & Surya Saluang²

Abstract: The optimism and persistence of small farmers, such as Alexander Chayanov's, view, need to be thoroughly explored by examining the demographic composition of the farmers' families, especially those of their younger generations. The paper is aimed at finding the critical existence of the Indonesian agricultural regeneration caused by the structural constraints. They can be in the form of political large-scale land allocation for corporates; and other structural patriarchal and gerontocratic constraints; instead of the young generations' motivation. If the above constraints are able to be eliminated, as two cases in Halmahera islands and one village in Kulonprogo regency, Yogyakarta, there will be large opportunity for them. The youths' enthusiasm will grow if there is an open access for them. The access can be in the form of land, work opportunity, knowledge on agriculture as well as agricultural policy for household-scale.

Keywords: youth farming generation, allocation policy, patriarchal and gerontocratic cultures, access.

Abstrak: Optimisme peran dan persistensi petani kecil sebagaimana pandangan Alexander Chayanov perlu lebih didalami dengan melihat komposisi demografis keluarga masyarakat tani, khususnya generasi muda mereka. Tulisan ini mengkaji adanya krisis regenerasi pertanian Indonesia yang lebih disebabkan adanya kendala-kendala struktural berupa politik pengalokasian tanah skala besar untuk korporasi; dan kendala kultural yang bersifat patriarkis dan gerontokratis; alih-alih absennya motivasi generasi muda. Ketika kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus di dua desa di kepulauan Halmahera dan satu desa di Kulonprogo, Yogyakarta, maka terbuka peluang besar keterlibatan mereka. Antusiasme generasi muda akan tumbuh ketika segenap akses terbuka luas bagi mereka, yakni berupa tanah, keterbukaan tenaga kerja, pengetahuan pertanian, serta kebijakan pertanian skala rumah tangga.

Kata kunci: generasi muda pertanian, politik alokasi, budaya patriarkis dan gerontokratis, akses

A. Pendahuluan

Diferensiasi agraris dalam studi agraria setidaknya tidaknya selama ini dilihat dari tiga pandangan utama. *Pertama*, pandangan yang melihat masyarakat desa secara romantik sebagai satu unit sosial yang kohesif, solid, *idyllic* dalam lingkungan desa yang rukun dan tanpa konflik. Retakan sosial dianggap sebagai 'deviasi' yang disebabkan faktor eksternal seperti masuknya pengaruh pasar dan kolonialisme, mengabaikan kenyataan diferensiasi yang telah ada terjadi jauh sebelumnya. Pandangan

kedua melihat desa secara dikotomis yang bersifat transisional maupun terpisah antara 'tradisional atau mekanik', 'modern atau organik', seperti yang dirintis pemahaman ini oleh Emile Durkheim. Dan yang paling lazim adalah pandangan *ketiga*, Marxian, yang melihat masyarakat desa dalam hubungan kekuasaan antar-kelas sosial berbasis penguasaan alat-alat produksi (Wiradi 2009, hlm.198). Studi mutakhir mengenai dinamika kelas dalam perubahan agraria mendasarkan beberapa pertanyaan kunci mengenai penguasaan alat produksi, hubungan ketenagakerjaan, produksi-reproduksi dan akumulasi (Bernstein 2010).

Di luar pemahaman di atas, terdapat pandangan yang meletakkan isu kelompok usia (generasi) atau secara 'diferensiasi demografis' di dalam melihat

¹ Pengajar di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, email: anasluthfi@gmail.com

² Peneliti di Sajogyo Institute, Bogor, email: suryasaluang@ymail.com

masyarakat tani (*peasant society*) di pedesaan. Untuk memahaminya, dilakukan studi yang mengambil tema mobilitas vertikal dalam konteks sosial. Pandangan ini dirintis oleh ilmuwan Rusia bernama Alexander Chayanov (1888-1937). Struktur dan dinamika masyarakat pertanian terbentuk dari relasi antara tenaga kerja dan produksi. Telaah mutakhir terhadap pemikiran Chayanov menggarisbawahi bahwa ‘masyarakat tani’—bukan korporasi dan skala luas negara pilihannya—memainkan peran penting di dalam produksi pangan dan keberlanjutannya pada masa kini, meskipun mereka dalam kenyataannya sering diabaikan (van der Ploeg 2013). Pandangan optimis yang disertai dengan argumen-argumen mendalam itu harus disertai pertanyaan mengenai siapa dan dalam kelompok usia mana mereka masyarakat tani yang dapat mengambil peran penting dalam perjuangan atas pangan, keberlanjutan dan kedaulatan pangan tersebut. Generasi muda tidak dalam kondisi tertanggung, sehingga menjadi beban konsumsi yang dapat mengarah terjadinya krisis keluarga petani. Di sinilah pula inti dari gagasan Chayanov berupa keseimbangan antara *labor* dan *consumption*. Oleh karena itu penting membaca kembali ‘masyarakat tani’ ala Chayanovian dalam konteks antar-generasi.

Tulisan ini didasarkan pada telaah teoretis mengenai optimisme terhadap masyarakat tani di atas (van der Ploeg *ibid.*) dan berbagai kendala yang dihadapinya utamanya kelompok usia muda (Ben White 2011, Ben White 2012). Disajikan dua kasus empiris di Indonesia untuk mendukung argumen optimistis itu.

B. Asumsi Dasar

Tulisan ini berasumsi bahwa keterbatasan generasi muda dalam aktivitas pertanian adalah ‘akibat’ dari persoalan dan struktur yang lebih luas, dan bukan ‘sebab’ internal lemahnya motivasi mereka. Mendorong mereka masuk kedalam pertanian berarti mengubah kendala-kendala

struktural dan kondisi yang kompleks ke arah yang lebih *accessible* bagi generasi muda, melebihi peningkatan kapasitas mereka.

Istilah-istilah kunci perlu terlebih dahulu dikonseptualisasi dalam mengkaji isu kelompok usia masyarakat petani: anak muda dan pertanian. Istilah ‘anak muda’ dapat dilihat sebagai kategori sosial maupun kategori biologis. Mereka dapat dilihat sebagai kategori tindakan, praktik (sub)kultur, identitas, dan generasi. Dalam kosa kata resmi, istilah anak muda digunakan bukan untuk menandai usia atau konstruksi biologis, namun seringkali konstruksi sosial, contoh Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Karang Taruna, Pemuda PDI, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, *sinoman*; bahkan kepegawaian seperti penata muda; dan sebagainya. Rentang usianya sangat fleksibel, mulai dari belasan hingga 40-an tahun (Ben White 2011).

Penggunaan istilah “muda” sering berfungsi untuk menjadikan mereka sebagai masa transisional yang dalam relasi kekuasaan berfungsi menjadi zona pengaman bagi posisi di atasnya, dan dapat diabaikan keberadaannya sewaktu-waktu tatkala tidak dibutuhkan. Ben White (2011, hlm. 2) menyatakannya, “*to exclude them from mainstream social, economic and political processes as something less than full members of society, less than full citizens*”. Istilah ini didefinisikan dalam amatan orang tua yang melihatnya sebagai fase yang tidak stabil. Bahkan, ada kecenderungan negara (pengganti patron sebagai orang tua) untuk memperpanjang usia sebutan anak muda untuk kepentingan tersebut (untuk Indonesia 18-35, Malaysia 18-40/45). Sementara bagi anak muda sendiri, kepemudaan berarti adalah “sekarang dan di sini”, “sebagai manusia penuh”, “mengalami saat ini dan bukan untuk nanti”.

Istilah pertanian dalam studi agraria dibedakan antara pertanian sebagai *farm* (usaha tani), dengan *agriculture* (pertanian); *peasant* (kaum tani) dan

farmer (pengusaha pertanian) (Bernstein 2010). Maka menjadi penting membaca anak muda bertani itu sebagai kaum tani (mulai dari buruh, petani gurem, petani menengah, petani kaya), ataukah bertani sebagai pengusaha pertanian dalam skala luas ataukah buruh perusahaan pertanian-perkebunan (*agribisnis, estate*).

C. Kebijakan dan Struktur Pertanahan yang Kompleks

Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi masa depan pertanian. Dalam rentang hampir satu dekade, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa mengalami penurunan, dari yang semula 43% (tahun 1993) menjadi 32% (tahun 2010). Data BPS tahun 2011 menyebutkan jumlah pemuda sebanyak 62,92 juta jiwa, hanya sekitar 6,9 juta atau sekitar 11 % yang bekerja di sektor pertanian. Sisanya 'bekerja' di sektor lain yang tidak juga bisa didefinisikan sebagai pekerja tetap. Menurunnya generasi muda pertanian ini seiring dengan penurunan secara total tenaga kerja pertanian di Indonesia. Hasil Sensus Pertanian BPS 2013 menyatakan bahwa dalam rentang satu dekade terakhir ini terdapat penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) tanaman pangan sebanyak 979.867 jiwa dari yang semula 18.708.052 (2003) menjadi 17.728.185 (2013). Ditambah dengan RTUP tanaman non-pangan, maka jumlah keseluruhan petani di Indonesia adalah 26,13 juta (BPS 2013) yang juga mengalami angka penurunan.

Untuk membaca kecenderungan penurunan tersebut, kita harus meletakkan ke dalam konteks yang lebih luas. Makin rendahnya usia muda dalam pekerjaan berbasis tanah di berbagai negara di dunia adalah akibat dari kebijakan dan kondisi struktural pertanahan yang kompleks (Ben White 2011, hlm. 6). Ia menjelaskan bahwa *pertama*, terjadi penurunan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian (*deskilling youth on agriculture knowledge*). Pendidikan keluarga hingga pendidikan for-

mal menganggap pertanian dan pedesaan adalah masa lalu, bukan masa depan. Pendidikan mengabaikan urgensi pertanian. Bahkan, fakultas pertanian semakin hari sepi peminat. Pendidikan mengajarkan generasi muda "ilmu pergi" dari pertanian-pedesaan dan bukan mengajarkan "ilmu menetap" kembali ke pertanian-pedesaan setelah mereka belajar di kota. Akibatnya, terjadi penurunan keterampilan anak muda dan pengetahuan mereka mengenai pertanian. Dalam kondisi demikian, kembali ke pertanian adalah mimpi yang romantik.

Kedua, akibat menurunnya kehidupan pertanian dan pedesaan sebab pembangunan dan kebijakan yang bias perkotaan. Desa hanya diposisikan sebagai penyuplai tenaga kerja murah yang bisa dipekerjakan di perkotaan, penyedia stok pangan untuk diangkut ke jalur-jalur distribusi supra-desa. Industrialisasi pedesaan tidak tumbuh yang semestinya menempatkan populasi desa sebagai aktor pelaku dan penerima manfaatnya. Maka yang terjadi adalah industri *di* desa, dan bukan *oleh* desa. Dengan demikian, desa dan pertanian adalah pelontar bagi tenaga kerjanya untuk ditarik magnet magnet perkotaan yang dinilai menjanjikan, atau ditempatkan di *enclave-enclave* perkebunan sebagai kuli kontrak (ala Kolonial) atau buruh perusahaan perkebunan (Orde Baru) yang diantaranya melalui program transmigrasi yang diintegrasikan dengan perluasan industri perkebunan. Setiap desa di pulau Jawa memiliki sejarah migrasi dan transmigrasi yang panjang.

Ketiga, jika pun anak muda ingin bertani, tidak ada akses atas tanah bagi mereka. Budaya patriarkis dan grontokrasi, dimana masyarakat berorientasi mementingkan orang dewasa ketimbang anak muda, tercermin dalam budaya pewarisan. Warisan baru diberikan oleh orang tua menjelang mereka meninggal, kepada anak-anaknya yang juga telah berusia dewasa. Tidak banyak orang tertarik memulai menjadi petani ketika mereka menerima warisan pada usia 40-an tahun. Akibatnya, tanah

tetap ada di tangan orang tua atau komunal (keluarga). Menginginkan anak muda bertani berarti mengubah budaya patriarkis-grontokratis dan budaya mewaris yang tidak berpihak pada anak muda ini.

Keempat, terdapat masalah serius yang terjadi di keluarga pedesaan Indonesia, yakni keterlepasan tanah keluarga. Orang tua memodali anak menempuh pendidikan dengan cara menjual cadangan kekayaan mereka utamanya tanah. Demikian juga saat mereka memodali anak untuk bekerja (yang tragisnya hanya untuk menjadi buruh kota), bahkan untuk biaya pernikahan anak-anaknya. Mereka tidak berupaya memberinya tanah agar bisa bekerja di pertanian. Akibatnya, generasi tua dan generasi muda pedesaan kehilangan tanah. Ketika anak muda ingin kembali lagi ke pertanian, mereka sudah tidak punya akses atas tanah. Salah satu proses pemiskinan pedesaan terjadi melalui cara tersebut.

Kelima, ancaman pembangunan ekonomi ekstraktif dan pembangunan infrastruktur yang mengkonversi lahan-lahan produktif pertanian, atau mengubah pertanian skala rumah tangga menjadi skala korporasi. Banyak media memberitakan atas hasil olah data BPS 2012 yang melaporkan adanya konversi lahan pangan sejumlah 100.000 ha/tahun, dan jumlah petani berkurang 3,1 juta/tahun (7,42% populasi). Akan tetapi kebijakan pemerintah di banyak kabupaten di Indonesia seakan menutup mata proses penghilangan lahan pangan ini (Kompas 12 Juni 2012).

Bahkan jika kita melihat perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dari tahun ke tahun, terdapat ketimpangan yang luar biasa bagi lahan pertanian, sebagaimana yang dianalisa oleh Bachriadi dan Wiradi (2011). Berbagai kebijakan telah membagi bentang alam Indonesia ke dalam sektoralisasi berupa kehutanan, pertambangan, perkebunan, industri dan perluasan kota, serta pariwisata dan pertanian. Di sektor pertanian pada tahun 2003 terdapat sejumlah 37,7 juta

petani yang menguasai 21,5 juta ha dalam berbagai variasi luasan penguasaannya. Jika dirata-rata maka mereka menguasai tanah seluas 0,89 ha. Rataan ini sangat jauh ketimpangannya bila dibandingkan dengan penggunaan-peruntukan lain sektor-sektor lain. Secara internal, kelas penguasaan tanah masyarakat tani dari tahun ke tahun mengalami pergeseran berdampak membesarnya angka petani gurem.

D. Membiarkan krisis tenaga kerja muda

Generasi muda di dunia menghadapi masalah serius yakni masalah pengangguran. Diperkirakan, lebih dari separo penduduk di negara berkembang tinggal di desa (Amerika Latin, Karibbean, Timur Tengah, Afrika Selatan, termasuk Indonesia). Sejumlah 70% dari mereka hidup miskin, 80% dari mereka bekerja di pertanian. Sementara terdapat fakta bahwa jumlah pengangguran anak muda usia 15-24 dua kali lipat dibanding orang tua. Kemiskinan melanda anak muda yang perkiraan jumlahnya adalah 1/5 dari populasi dunia (Ben White 2011, hlm. 3).

Pengangguran terkait dengan banyak hal. Temuan menarik dari suatu penelitian menunjukkan ada korelasi antara pendidikan dengan kesempatan kerja. Pendidikan memperpanjang usia kanak-kanak (*postpone childhood*) generasi muda, dan menghilangkan kesempatan mereka pada pekerjaan. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Ben White (1970, 1980, 1990-an) membandingkan waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dalam tiga jenis kegiatan (pekerjaan rumah tangga, pekerjaan produktif, dan sekolah). Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa sekolah memperpanjang ke-kanak-kanakan (*childhood*) diiringi gaya hidup yang berubah cepat. Kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi dengan mengeluarkan uang meningkat drastis sebab bersekolah dan perubahan gaya hidup tsb, namun anak-remaja berkurang kesempatannya dalam aktivitas produktif yang menghasilkan uang. Akibatnya, perubahan

yang terjadi dari dekade ke dekade menunjukkan semakin tergantungnya secara finansial generasi muda terhadap orang tua, “*in a condition of strong dependence on parents, elder siblings or other relatives for access to cash and this become a source of tension*” (Ben White 2012 hlm. 96). Pengangguran generasi muda semakin terjadi dan bisa menjadi sumber konflik.

Selain aktivitas sekolah, model pembangunan neoliberal menghancurkan kesempatan kerja banyak sektor sehingga terjadi surplus tenaga kerja. Pembangunan industrial bukan penyedia pasar tenaga kerja, malah banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Generasi muda pedesaan mengalami kondisi terlepas dari (calon) tenaga kerja pertanian menjadi buruh, dan terlepas dari buruh menjadi pengangguran sebab di-PHK. Sebagian mengadu nasib menjadi buruh migran. Kondisi inilah yang disebut sebagai *deagrarianisasi* atau *depeasantitation*.

Pemerintah tidak memiliki kebijakan mendasar mengenai surplus populasi yang terlempar dari pertanian sebagaimana angka-angkanya disebut di muka. Mereka yang terlempar menjadi buruh-buruh di perkotaan dipromosikan sebagai daya tarik investasi. Salah satu nilai keunggulan investasi manufaktur dan garmen di Indonesia adalah karena negeri ini memiliki tenaga kerja murah, bisa di-*outsourcing*-kan sehingga bisa dipecah sewaktu-waktu jika tidak lagi dibutuhkan. Inilah cara pemerintah dalam ‘menyalurkan’ tenaga kerja negerinya. Politik upah murah secara resmi dan menyolok digunakan oleh BKPM untuk mengundang investasi. Dalam promosinya yang bertajuk *Invest in Remarkable Indonesia*, upah buruh yang murah dijadikan daya tarik. Mengutip Economic Intelligence Unit, brosur BKPM mencantumkan upah buruh Indonesia yang hanya USD 0.6 per jam dibandingkan dengan India (1.03), Filipina (1.04), Thailand (1.63), Cina (2.11) dan Malaysia (2.88). Menyertai angka-angka tersebut brosur promosi itu mencantumkan “*labor cost is relatively low, even as*

compared to investment magnets China and India” (Tjandraningsih 2012). Maka tidak ayal, beberapa tahun belakangan muncul iklan penjualan TKI di Malaysia yang menuai kritik, “*Indonesian Maids, now on SALE!*”.

Bukan dengan menjadikan pertanian dan pedesaan sebagai basis pembangunan yang disertai pengutamaan golongan lapis bawahnya agar dapat bertransformasi, dan memberi iklim kondusif bagi pertanian agar mampu menarik tenaga muda pedesaan Indonesia, pemerintah memilih ‘mentransformasikan’ mereka sebagai tenaga kerja lepas (*footlose labor*) yang tidak terserap ke sektor kerja manapun (*surplus labor*). Kecenderungan inilah yang disebut sebagai “negeri agraris, ingkari agraria” (Tjondronegoro 2008). Program *entrepreneurship* juga bagian dari ketidak-mampuan negara dalam membuka saluran tenaga kerja dari dan di pertanian. Program kewiraswastaan yang diajarkan di universitas (*entrepreneur university*) menjadi indikasi dari lepas-tangannya negara dalam penyedia lapangan kerja baru.

E. Persistensi Anak Muda Bertani

Hal-hal yang telah disajikan di atas adalah sebab-sebab yang bersifat struktural dan kompleks yang berada di luar kendali anak muda sendiri. Pengalaman-pengalaman berikut sesungguhnya cukup memberi bukti bahwa ketika kendala-kendala (*constrain*) yang bersifat struktural dan kultural di atas teratasi, generasi muda pedesaan dapat mengambil peran penting dalam pertanian.

Ada beberapa contoh keterlibatan dan kepedulian anak-anak muda terhadap pedesaan dan aktivitas mereka di pertanian. Qaryah Thayyibah di Salatiga mengembangkan pendidikan alternatif dengan visi pendidikan kemandirian dan berbasis komunitas desa (Bahruddin 2007). Pesantren Ath Thariq di Garut mendidik santri-santrinya bertani dan berdaulat benih lokal. Mereka mengumpulkan dan menanam kembali benih-benih pangan dan non-pangan yang mulai sulit dijumpai di masyara-

kat. Pesantren ini menyebut diri sebagai pesantren ekologi (Ibang Lukmanurdin tt). Kedua komunitas di Salatiga dan Carut ini memiliki perencanaan jangka panjang pengembangan komunitas mereka (Master Plan Pemuda Qaryah Thayyibah 2012-2016; Renstra Ath Thaariq 2015-2019). Demikian pula di Ciamis dengan adanya SMP Plus Pesawahan, Ciamis. Anak-anak didik di sana akrab dengan 'pena dan cangkul', berhasil menulis pengalamannya dalam buku *Aku Bangga Jadi Anak Desa* (Tim Pergerakan ed 2005).

Pada bagian ini disajikan pengalaman empiris lokal di Lolobata dan Gotowasi, Halmahera, dan pesisir Kulonprogo di Yogyakarta, yang anak-anak mudanya terlibat aktif dalam aktivitas pertanian. Ketiganya mencerminkan hal serupa bahwa keterbukaan akses atas tanah dan dibukanya keterlibatan dalam produksi pertanian menjadi ciri utama kemauan anak muda dalam ekonomi pertanian.

1. Pengalaman dari Kepulauan Halmahera

Dari bagian timur Indonesia, di kepulauan Halmahera setidaknya ada dua desa yang memberi contoh bagaimana para pemudanya secara aktif terlibat sebagai petani: Lolobata dan Gotowasi.

(a) Desa Lolobata dan Kebun Kelapanya

Desa ini terletak di bagian paling dalam dari sisi timur kepulauan, dengan pertanian utama kebun kelapa. Memasuki era 2000-an, menyadari ancaman berubahnya kondisi pertanian lokal akibat pertambangan dan konversi lahan yang terus-menerus terjadi, desa Lolobata mengembangkan sistem kebun komunal (kelapa) yang telah ada untuk satu desa bersama yang disebut dengan Kebun Teba. Posisi anak muda cukup penting dalam tata kebun komunal ini, dengan suatu pemahaman bersama bahwa kebun komunal adalah alat untuk menjamin masa depan generasi Lolobata. Artinya, Kebun Teba tidak sekedar soal pengasilan saat ini semata, namun mereka harapkan sebagai tumpuan keberlangsungan sumber penghi-

dupan di masa depan. Kepada anak-anak muda itu kerap ditekankan, bahwa biaya mereka bersekolah sampai ke perguruan tinggi didapat dari keberkahan kebun komunal.

Begitulah, anak muda Lolobata dengan bangga menyebutkan bahwa kemampuan mereka mengenyam pendidikan adalah berkat hasil pertanian dari kebun kelapa milik bersama. Pertanian mengongkosi mereka bersekolah di Ternate, tidak kemudian 'pergi' meninggalkan pertanian yang telah berjasa untuk beralih ke bidang pekerjaan yang lain. Tatkala menjalani kuliah anak muda Lolobata mengatur waktu mereka antara berada di Ternate dan kampung halaman. Daur keluar-masuknya mengikuti siklus panen kelapa. Setiap empat bulan sekali mereka akan pulang melakukan kerja panen, seperti menurunkan kelapa dari pohon, mengupasnya, menjemur ataupun memanaskan kelapa menjadi kopra, menyisihkan beberapa kelapa tua untuk dapur sendiri (membuat santan dan minyak goreng), menggiring gerobak dari kebun sampai ke kampung, dan menjalin transaksi dengan pedagang pengepul. Setelah semua putaran ini selesai, mereka akan kembali lagi ke Ternate membawa sejumlah uang. Uang bersumber dari kampung halaman dan dihabiskan di kota untuk biaya pendidikan. Di hari-hari biasa, perawatan kelapa yang tidak terlalu intensif itu diserahkan kepada keluarga. Jika mereka telah lulus kuliah, keluarga akan berunding kepada siapa kebun kelapa akan dititipkan, diwariskan pengurusannya, dan didistribusikan pekerjaan mengelolanya.

Saat ini sekitar 50 orang lebih pemuda Lolobata mengenyam pendidikan Strata 1 di Ternate dan Manado, dan sekitar 5 orang menempuh pendidikan Strata 2 di Jawa dan Sulawesi. Jumlah Kepala Keluarga di desa ini sekitar 275 KK, dengan total penduduk 920 jiwa. Hampir bisa dipastikan terdapat satu mahasiswa di setiap 17 orang penduduknya. Fenomena ini sangat

mencengangkan, untuk sebuah desa yang secara geografis paling tersuruk di bagian timur laut kepulauan Halmahera, dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya yang lebih dekat ke pusat pemerintahan dan ekonomi namun untuk menempuh pendidikan tingkat atas pun masih terkendala.

Kebun Teba mulai dibangun tahun 1999. Perataannya sempat terhenti akibat konflik besar tahun 1999-2000 di kawasan kepulauan Ambon ini. Pasca konflik perawatan kembali dilakukan, dan pada tahun 2005 gelombang anak muda yang mengenyam pendidikan tinggi dari Lolobata mulai merambah ke Ternate. Kesemuanya bermodalkan hasil kebun tersebut.

Walau saat ini masih belum secara pasti dikatakan apakah mereka mengamalkan 'ilmu pergi' atau 'ilmu menetap', sementara mereka masih berkuliah, setidaknya sampai penelitian ini dilakukan, umumnya anak-anak muda Lolobata memiliki visi untuk menjaga dan meneruskan pertanian sebagai basis ekonomi utama. Sekitar 50 orang pemuda yang sedang menempuh pendidikan Strata 1, membentuk suatu wadah kerja bersama untuk memberikan penyuluhan kepada warga desanya sendiri, mengenai pentingnya pertanian bagi ekonomi dan ekologi, dan betapa pertambangan yang digencarkan oleh pemerintah daerah melalui keberadaan PT Aneka Tambang dan beberapa perusahaan lain, yang kini sedang gencar mengupayakan konversi lahan, sangatlah membahayakan ekologi dan sama sekali tidak menjanjikan bagi keberlanjutan ekonomi. Generasi muda dan para warga belajar dari fenomena pertambangan yang telah marak di sekitar mereka. Ajakan untuk kembali pada pertanian disuarakan oleh para pemuda dengan contoh nyata adalah diri mereka sendiri (Saluang dkk 2015).

(b) Hutan Cengkeh dan Pala di Gotowasi

Tak jauh berbeda dari Lolobata, Gotowasi

sebuah desa yang juga berada di bagian paling tersuruk, di belahan tenggara kepulauan Halmahera. Hampir tidak ada pengangguran di desa ini, sekaligus hanya ada satu anak putus sekolah. Tingkat pendidikan terendah untuk anak muda desa ini adalah sarjana. Dengan posisinya yang sangat tersuruk secara geografis, desa ini ternyata merupakan penyumbang generasi berpendidikan yang cukup dikenal di Ternate. Hampir semua kalangan pendidikan di kota ini mengenal bahwa arus pelajar dan mahasiswa baru dari Gotowasi akan selalu ada setiap tahunnya. Jika tidak ada, maka dalam anggapan masyarakat, berarti kampung ini telah kehabisan anak muda usia sekolah. Sejak pendidikan tingkat atas, pemuda Gotowasi sudah berangkat ke kota dan terus melanjutkan pendidikannya sampai tingkat sarjana. Semua ini lagi-lagi dibiayai dari hasil pertanian. Jika di Lolobata mengandalkan pertanian kelapa, pemuda Gotowasi mengandalkan pertanian pala dan cengkeh. Desa ini sangat menikmati keberadaan pala dan cengkeh yang sudah ada sejak masa kolonialisme rempah di kepulauan ini. Tidak perlu perawatan khusus atau kerumitan-kerumitan tertentu, pala dan cengkeh yang sudah berusia abad itu tinggal dipanen setiap kali berbuah matang. Mereka menyebut satuan lahan pertaniannya sebagai hutan, bukan lagi kebun atau ladang, mengingat demikian luas dan suburnya kebun pala mereka. Hutan pala dan hutan cengkeh, jika dipanen oleh lima desa sekaligus, hasilnya tidak akan habis-habis (Novrian 2012). Polanya tidak jauh berbeda, anak-anak muda ini melibatkan diri menjadi petani setiap masa panen, sampai menjalin transaksi dengan pengepul dan seterusnya pergi ke kota membawa uang hasil jualan panen, dan terus bersekolah kembali. Bisa menempuh pendidikan tinggi di kota besar dengan mengandalkan hasil dari pertanian menjadi kebanggaan bagi anak muda Gotowasi. Tidak sedikit komentar

bermunculan, bagaimana tenag dan khususnya pemuda Gotowasi menjalani pendidikan, berkat jaminan pembiayaan dari kegiatan pertanian mereka sendiri. Bisa menempuh pendidikan tinggi di Ternate, bukanlah hal yang mudah bagi kebanyakan masyarakat kepulauan Halmahera (Novrian 2012).

Anak-anak muda Gotowasi masih bisa menikmati keberadaan kebun-kebun pala dan cengkeh yang harga buahnya masih baik. Namun keterlibatan mereka dalam pelestarian ekonomi-sosial berbasis tanah mulai mendapat tantangan berat. Ada beberapa perubahan ketika gelombang pendidikan tinggi berlangsung demikian semarak di Gotowasi, beriring dengan semakin banyaknya anak muda Gotowasi yang terserap ke dalam kerja formal di perkotaan. Keterlibatan anak muda pada pertanian di Gotowasi, sepertinya masih lebih banyak sebatas memetik hasil dari kebun, dan sedikit saja yang kembali terlibat langsung memperkuat keberadaan kebun. Perubahan situasi dan berbagai pengaruh cara pandang dari pendidikan tinggi itu sendiri serta cara hidup di perkotaan, bisa menjadi ancaman bagi kelestarian sumber penghidupan pertanian.

Memasuki tahun 2008 ekspansi pertambangan yang secara aktif didorong oleh pemerintah setempat bersama PT. Antam menjadi ancaman bagi desa ini. Beberapa warga tergoda mengalih-fungsikan lahan ke pertambangan melalui mekanisme pemberian ganti rugi atau jual beli. Sebagian warga yang bekerja di sektor formal yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi, melihat bahwa tambangan mampu menghasilkan lebih besar lagi uang dalam waktu singkat. Akan tetapi mereka menjadi paham bahwa pertambangan di beberapa tempat lain di wilayah Halmahera, selalu gagal menunjukkan adanya jaminan keselamatan ekologi dan ekonomi bagi warga sekitar, kecuali hanya dinikmati oleh pemburu rente tatakala

memperoleh tanah masyarakat. Membandingkan kegiatan pertanian hutan pala dan hutan cengkeh yang telah mereka nikmati, pada akhirnya terdapat rasionalitas petani, bahwa mereka tetap memilih cengkeh dan pala.

Pada awal tahun 2012 warga desa Gotowasi secara keseluruhan bisa bersepakat untuk menolak pertambangan, termasuk gagasan pertanian inti-plasma perkebunan sawit yang juga disodorkan pemerintah daerah ke desa ini pada pertengahan tahun 2011. Sampai saat ini, bagi mereka belum ada satupun sistem ekologi-ekonomi yang lebih baik ketimbang apa yang sudah mereka miliki dan jalani saat ini melalui hutan pala dan hutan cengkeh.

2. Wong Cubung menjadi Petani Makmur di Lahan Pesisir

Di titik pusat pulau Jawa, 'ilmu menetap' dari pertanian bisa dicermati lebih seksama dalam pengalaman beberapa desa di pesisir Kulonprogo, Yogyakarta. Desa-desa sepanjang wilayah ini merupakan penghasil utama cabe merah keriting dan buah melon, khususnya sejak era 2000-an dan semakin terkenal saat ini. Beberapa di antaranya adalah desa Karang Wuni, Bugel dan Garongan. Warga di ketiga desa ini menanam cabe keriting di hamparan pasir pantai, suatu hal yang sebelumnya tidak masuk akal baik bagi para petani itu sendiri apalagi bagi kalangan ilmuwan pertanian.

Cerita di sekitar awal pembudidayaan tanaman cabe keriting hingga kini di sepanjang pesisir Kulonprogo adalah cerita tentang pemuda. Pada awalnya di sekitar tahun 1983/84, seorang pemuda bernama Sukarman, baru saja lulus kuliah jurusan teknik sipil di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Mengandalkan ijazah yang dimilikinya, Sukarman hijrah ke Jakarta, mengikuti harapan umumnya saat itu bahwa Jakarta adalah tempat yang tepat untuk mengadu peruntungan. Selama dua tahun ia mencoba peruntungan di ibu kota, namun tidak juga bisa mendapatkan pekerjaan tetap, kecuali

hanya kerja serabutan di sana-sini, khususnya menjadi kuli bangunan. Ijazahnya hanya mampu mengantarkan menjadi kuli bangunan dari satu bos ke bos yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1986 Sukarman memutuskan untuk pulang ke desanya, Bugel, yang bersama desa-desa lain di sekitarnya saat itu dikenal sebagai tempatnya 'Wong Cubung'. Istilah ini memiliki konotasi negatif untuk merendahkan, yang berarti *orang miskin* dan *berkulit kotor* (karena kesulitan air tawar).

Pertanian hortikultura di wilayah pesisir ini bermula dari ketidaksengajaan. Sosok Sukarman di atas pada suatu ketika berjalan-jalan di pinggir pantai dan melihat sebatang cabe rawit tumbuh berbuah di atas ongkongan tanah. Menurut penerutannya, ada tiga buah cabe yang telah menghijau di atas tanah tersebut. Setelah dikorek, ongkongan tanah tersebut ternyata adalah kotoran sapi (Cahyono dan Yanuardy 2009). Ia memutuskan untuk mencoba bertanam di sebidang kecil lahan pasir dengan menambahkannya kotoran sapi terlebih dahulu, sebelum menaburkan benih di atasnya. Banyak warga desanya menganggap apa yang dikerjakan Sukarman tidak mungkin berhasil. Bahkan ia dikira sudah 'stress', sakit jiwa karena tak juga mendapat kerja dan frustrasi sepulang dari ibu kota.

Dua tahun Sukarman berusaha menyempurnakan usaha bertanam cabe itu di tengah sinisme dan pesimisme warga. Akan tetapi perubahan mulai tampak. Satu-dua warga mulai melirik apa yang diusahakannya. Hingga makin lama, pertanian cabe keriting di lahan pantai semakin nyata menjadi satu-satunya hal yang hanya ada di pesisir Kulonprogo. Memasuki pertengahan tahun 1990-an sudah mulai merata warga pesisir di ketiga desa tadi mengusahakan pertanian ini. Tanah pesisir yang semula menganggur dalam bentuk luasan pasir dengan berbagai jenis status kepemilikannya itu menjadi lahan pertanian yang produktif dan dikuasai serta dimiliki oleh para petani yang aktif mengusahakannya. Meski demikian, saat itu

gelombang anak muda pergi ke kota mencari pekerjaan masih tinggi di ketiga desa ini sampai akhir 1990-an. Mereka menjadi buruh migran terutama untuk tujuan Malaysia dan Taiwan.

Dengan luasan lahan yang sama, di lahan pesisir hasilnya bisa 3 kali lipat lebih banyak ketimbang di lahan biasa, dengan durasi panen yang juga lebih lama. Pasar pun juga meminati cabe dari pesisir Kulonprogo, selain tampilannya yang mengkilat dan padat, daya tahannya juga lebih lama, antara 1 minggu sampai 10 hari setelah panen. Alhasil pendapatan masyarakat tani meningkat pesat. Memasuki era 2000-an, terjadi arus balik tenaga kerja. Ketika makin terbukti bahwa tanaman cabe di lahan pantai justru bisa menghasilkan jauh lebih banyak dibanding di lahan biasa, generasi mudanya mulai tertarik dan masuk kembali ke pertanian. Mereka yang semula pergi merantau di kota hingga menjadi buruh migran, berdatangan pulang. Fenomena ini berlangsung di sekitar tahun 2003 sampai 2005. Sebelumnya, didahului dengan kepulangan para perantau ketiga desa ini dari berbagai kota di Jawa dan Sumatra (umumnya menjadi pekerja bangunan). Saat ini hampir semua pemuda di ketiga desa ini melibatkan diri sepenuhnya pada pertanian. Pertanian cabe di lahan pantai telah berkembang ke seluruh hamparan pesisir pantai Kulonprogo dan Bantul.

Pengolahan lahan pesisir melibatkan banyak keluarga petani, sekitar 30 ribu orang, yakni mereka yang ada di sepanjang 22 kilometer pesisir, melewati sekitar 10 desa. Masing-masing petani menguasai lahan seluas 1000-5000 m². Mulai dari anak-anak kecil hingga kakek-nenek bercocok tanam. Anak-anak sekolah pun pagi sebelum berangkat sekolah, menyempatkan untuk merawat tanaman, demikian juga saat pulang sekolah. Pegawai negeri di daerah itu, bahkan ada seorang polisi, yang penghasilan terbesarnya berasal dari bertani (Luthfi 2012).

Keberhasilan bertani di lahan pesisir memahamkan bahwa petani telah melahirkan serangkaian

inovasi (sains petani), berupa (1) pengolahan lahan pertanian di atas lahan pesisir, (2) sistem pengairan dengan sumur *renteng*, (3) penanganan hama, (4) penangkalan terpaan angin pantai yang dapat merusak tanaman dan merontokkan bunga-bunga cabe, (5) penjualan panen melalui sistem lelang sehingga antar petani tidak saling bersaing dan konflik, serta membuat posisi petani kuat dalam mengontrol harga. Menghadapi berbagai tekanan atas kebijakan pemerintah mengubah lanskap pesisir menjadi penambangan pasir besi dengan memberikan izin penambangan pada PT JMI dan PT JMM yang dimiliki oleh keluarga keraton dan pemodal Australia, warga pesisir Kulonprogo menunjukkan (6) kemampuan dan kekuatan berorganisasi, berjejaring, dan berargumentasi demi mempertahankan hak asasinya atas tanah mereka (Djafar Shiddieq dkk 2007, Luthfi 2012).

Usaha tani serta organisasi petani masyarakat pertanian lahan pesisir digerakkan oleh para pemuda. Apa yang mereka kembangkan itu pada gilirannya mengintegrasikan pergaulan mereka secara luas dengan pasar, komunitas organisasi tani lainnya, kalangan akademisi dan gerakan sosial. Tidak jarang masyarakat petani lahan pesisir yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Petani Lahan Pesisir ini menjadi tujuan belajar mahasiswa pertanian dan organisasi sosial lain. Bahkan beberapa kali Fakultas Pertanian UGM mengundang petani pesisir Kulonprogo, khususnya Sukarman, untuk memberi kuliah di hadapan mahasiswa mengenai sejarah dan teknik pertanian lahan pesisir.

Pada tahun 2008, anak-anak muda di desa Garongan mengiktikadkan semboyan, “Yang Muda Yang Bertani”. Mereka membentuk kegiatan-kegiatan komunitas dengan basis pendanaan dari kerja sebagai petani, dan menyuarakan semangat khususnya pada sesama anak muda agar kembali menekuni pertanian. Ditempuh cara-cara sederhana, seperti mengunjungi dari satu desa ke desa lainnya di luar Kulonprogo, saling bertemu dan

berbagi pengalaman, dan bahkan melalui kegiatan kesenian teater agar bisa menjangkau animo anak muda dan kaum perkotaan secara lebih luas dalam menjangkit semangat dan dukungan mereka pada pertanian. Satu-dua respon terus bertumbuhan dari berbagai tempat yang dikunjungi; di Klaten, Blora, Kebumen, Cilacap, Lumajang, dsb. Bahkan sekelompok anak muda di Kroya, Cilacap, yang tergabung dalam suatu wadah bernama Cahaya Muda Indonesia, menyambut ajakan ini dan mengembangkan kerja pertanian berkelompok di daerah mereka. Pada awalnya pemuda Kroya ini fokus pada pemulihan benih padi langka, yakni beras merah-putih yang penemuannya kembali serta perjuangan pembenihannya sempat mengemuka di media massa. Mereka juga mengembangkan pertanian berbasis pupuk organik cair. Melalui jejaringnya di seluruh Indonesia, semboyan “Yang Muda Yang Bertani” terus disuarakan. Mereka adalah generasi muda pertanian yang mengenyam pendidikan mencukupi, kemudahan akses di perkotaan, teknologi, pasar dan informasi. Bagi mereka, pengalaman membangun jaringan pertanian tidak sama sulitnya anak muda di perkotaan membangun jejaring organisasi mahasiswa. Pada panen raya cabe tahun 2008, petani muda di daerah ini berbondong-bondong mendatangi *dealer* untuk membeli motor secara tunai. Dengan motor besar buatan Jepang yang baru dibeli, mereka melakukan *touring* ke beberapa kota di Jawa.

Pesisir Kulonprogo sebagai “prototipe” pertanian lahan pantai, justru populer di berbagai tempat melalui jejaring warga petani sendiri. Sudah banyak petani dari berbagai tempat dari seluruh Indonesia dengan kondisi ekologi yang sama, datang belajar menerapkan pertanian pantai di pesisir Kulonprogo, dari Lampung, Bengkulu, Tasikmalaya, Kebumen, Cilacap, Klaten, Pacitan, Sulawesi Selatan, bahkan dari kalangan peminat pertanian mancanegara; Jepang, Belanda, Finlandia, Amerika dan Kanada. Salah satu tokoh mudanya, menghadiri berbagai forum dan bahkan menulis kesak-

sian berorganisasi dan pengalamannya menjadi bertani dalam bukunya, *Menanam adalah Melawan* (Widodo 2013).

Apa yang berlangsung di pesisir Kulonprogo adalah bukti tak terelakkan bagaimana pertanian masih merupakan pilihan yang relevan hari ini, tidak hanya dalam perekonomian rumah tangga, namun lebih jauh dari itu. Namun seringkali pengambil kebijakan justru menggunakan apa yang diistilahkan oleh Muhammad Yunus sebagai 'mata elang' dalam pertimbangan makro ekonomi. Mereka tidak mampu melihat optimisme lokal ekonomi pertanian yang tumbuh jika melihatnya melalui 'mata cacing' (Yunus 2007). Secara sepihak, sejak tahun 2006 pemerintah daerah kabupaten mengumumkan kawasan pesisir Kulonprogo akan dijadikan sebagai areal pertambangan pasir besi. Kebijakan ini dengan sendirinya akan menimpa lahan-lahan pertanian dan pemukiman warga. Bukannya menjadikan wilayah ini sebagai prototipe bagaimana masyarakat bisa mengupayakan keswadaanya sejak dari nol, pemerintah malah menutup mata dan telinga atas reaksi negatif yang terus berkembang atas rencana pertambangan.

F. Agenda Global Perampasan Tanah

Berbagai gambaran di atas merupakan ilustrasi untuk memperlihatkan bahwa daya dan etos anak muda pada pertanian sesungguhnya masih mengandung optimisme yang besar. Contoh dan gambaran seperti di atas, daftarnya akan semakin panjang jika kita membuka cara pandang lebih luas pada kenyataan yang boleh jadi dekat saja di sekitar kita masing-masing. Masih cukup banyak contoh hidup untuk dijadikan sumber belajar bersama bagaimana pertanian masih relevan sebagai pilihan ekonomi rumah tangga yang menjanjikan pada era sekarang. Secara global, bahkan terdapat kecenderungan gerakan perjuangan menuju '*repeasantization*' melalui berbagai bentuk, proses, dan cara. Di Cina transisi pertanian berlangsung dari sistem kolektif menuju usaha tani keluarga; *Movimento*

dos Trabalhadores Sem Terra di Brazil menghasilkan lebih dari 400.000 petani baru; bahkan di Eropa yang sekitar 15-20% petaninya saat ini menempuh jalur '*entrepreneurial road*' (van der Ploeg 2013).

Optimisme di atas saat ini menghadapi tantangan besar berupa kebijakan pengalokasian tanah dalam skala *gigantic*. Merosotnya luasan lahan pertanian telah menjadi keprihatinan banyak pihak sebagaimana uraian di atas, namun secara kontradiktif muncul kebijakan pemerintah yang bertolak belakang. Saat ini kita dihadapkan pada agenda besar pengadaan tanah skala raksasa (*land grab*) untuk berbagai kepentingan: pangan, energi (*bio-fuel*), perumahan, wisata, zona ekonomi khusus, kawasan lindung, transaksi tanah obyek spekulasi oleh negara-negara Utara dan Selatan di negara-negara Selatan (Zoomers 2010).

Di ujung timur Indonesia kepulauan Papua menghadapi kebijakan yang mengancam tanah-tanah warga. Pemerintah pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan yang terkenal dengan sebutan *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini adalah operasionalisasi dari pewacanaan global, dan inilah yang menjadi asumsi dasarnya, bahwa dunia sedang mengalami krisis energi dan pangan. Diperlukan terobosan kebijakan antar-negara guna mengatasinya, dan pilihannya berupa produksi pangan dan energi terbarukan (*bio-fuel*) dalam skala luas di negara-negara berkembang. Proyek MIFEE yang berlangsung di Merauke berupa pembukaan hutan-hutan alami dalam klaim-kuasa adat yang ijin kuasanya (total sekitar 2 juta hektar) kemudian diberikan kepada puluhan perusahaan-perusahaan asing maupun domestik. Hingga tahun 2012 diperkirakan sejumlah 46 perusahaan telah mengantongi ijin lokasi (*Tempo*, 8 April 2012 hlm. 54-68). Alih kuasa ini tidak dengan pendefinisian yang jelas; disewa, dipinjam, ataukah dibeli. Legitimasi adat seperti 'potong babi' sering digunakan dalam alih penguasaan adat ini, melalui peran para broker yang ironisnya muncul dari aktor adat-

pemerintah sendiri (Savitri 2012). Yang jelas, hutan-hutan ditebang untuk menghasilkan kayu cabik ekspor, dan tanah-tanahnya kemudian ditanami komoditas baru untuk pangan dan bio-fuel: sawit, sorgum, kedelai, jagung, dan gandum. Meski sebagian kecil telah berproduksi dan terbesar lainnya dalam tahap pembukaan lahan bahkan masih perencanaan, perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi ijin konsesi tersebut berani menawarkan kepada calon investor untuk menanamkan sahamnya dalam proyek Merauke ini.

Pada tahun 2015 ini hubungan antara tanah, ke(tidak)terserapan tenaga kerja (muda), dan ketidak-adilan alokasi lahan demikian jelas ditunjukkan dalam pengalaman Papua dalam konteks perluasan lahan pangan tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2015 yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya di atas lahan sawah padi yang dikelola dalam bentuk perusahaan pertanian padi PT. Parama Pangan Papua (PPP) yang dimiliki oleh salah satu taipan terkenal di Indonesia, Arifin Panigoro. Lahan sawah yang dipanen seluas 300 hektar dari 500 ha lahan yang dibuka pada Desember 2014, berlokasi di Wapeko, Kampung Ivi Mahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Lahan sawah ditanami padi *varietas lokal*, dengan hasil 8 ton/hektar, angka fantastis di atas rata-rata hasil pertanian keluarga 4-5 ton/ha. Diprediksi dalam waktu 3 tahun akan ada perluasan lahan untuk perusahaan padi 1,2 juta hektar dengan produksi 24 ton pertahun, sehingga akan dihasilkan sekitar 24 juta ton pertahun atau menyumbang 30 persen kebutuhan produksi nasional (HuMA 2015).

Optimisme makro berupa semata-mata pemuahan stok bahan pangan itu berkebalikan dengan pesimisme secara lebih luas jika melihat persoalan tenurial dan ketenagakerjaan. Lahan yang direncanakan pemerintah seluas 1,2 juta hektar itu akan diletakkan di bentangan alam Merauke, yang posisinya saat ini sebagian kawasan budidaya non kehutanan yang ada dalam izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit (266.274 ha), perkebunan tebu

(579.563 ha), hutan tanaman industri (593.942 ha), dan lahan pangan padi, ubi, kacang-kacangan, dsb (69.883 ha). Tersisa kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi (HPT dan HPK) (Catatan, *ibid*). Jika lahan dimaksud berada diluar lahan yang sudah berizin, artinya akan ada perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk pelepasan kawasan hutan menjadi lahan pangan. Dampaknya sangat berarti terhadap masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang telah tinggal di dalamnya serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan.

Dampak lain adalah pada tenaga kerja. Pertanian dengan sistem perusahaan skala besar (korporasi), selain melakukan pengambil-alihan tanah skala luas, juga membutuhkan kapital besar, teknologi tinggi, namun justru dengan tingkat keterserapan tenaga kerja yang rendah dan terseleksi. Bisa dipastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja dipenuhi dari luar dan bukan mengambil tenaga kerja lokal, dengan stigma-stigma negatif terhadap penduduk lokal. Akibatnya akan terjadi *surplus population*, utamanya tenaga kerja muda, yang terlempar dari tanahnya dan tidak terserap dalam ruang-ruang baru yang mengkonversinya. Di sinilah terjadi diskoneksi antara wilayah pengusiran dengan situs-situs pekerjaan yang dibuka sebagaimana dijelaskan oleh Tania Murray Li (2009).

Wacana bahwa dunia mengalami krisis pangan dan energi menemukan konteks pada level kebijakan nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitik-beratkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi ekspor. Indonesia merasa dalam dinamika ekonomi dan politik regional dan global yang sedang menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Untuk itulah, dirancang koridor-koridor ekonomi yang menghubungkan basis-basis produksi lokal sehingga dapat berhubungan langsung dengan distribusi dan tujuan ekspornya: (1) Koridor Ekonomi Sumatera fokus pada "Produksi dan

Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; (2) Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; (3) Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; (4) Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”; (5) Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”; dan (6) Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional” (Perpres RI. No. 32/2011 tentang MP3EI).

Konteks global dan nasional inilah yang menjadi kekuatan terbesar dalam mentransformasikan penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Konteks semacam ini menjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan terekodusnya populasi pedesaan, termasuk generasi mudanya dari tanah-tanah mereka. Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana nantinya masyarakat (adat) Papua tidak lagi memiliki tanah yang dianggap sebagai ‘ibu’, sehingga mereka tidak bisa lagi mewariskan kepada generasi turunannya kelak kemudian hari. Generasi penerus mereka adalah generasi tanpa ibu. Juga, tidak terbayangkan jika generasi muda Lolobata, Gotowasi, dan pesisir Kulonprogo ditransformasikan dari posisinya mereka sebagai pelaku utama pertanian menjadi buruh aktivitas pertambangan, atau bahkan menjadi eksodus dari tanahnya dan tidak terserap secara marjinal dalam ekonomi pertambangan baru.

G. Kesimpulan

Masa depan anak muda dan pertanian akan suram gambarannya jika struktur lebih luas mengenai kebijakan agraria dan struktur sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia masih berorientasi pada ekonomi skala besar korporasi dan bukan rumah tangga, serta patriarkis dan gerontokratif. Di sisi lain absennya negara dalam memenuhi hak

dasar warganegaranya dan bahkan melegitimasi proses kapitalisasi agraria melalui pengembangan sistem produksi skala korporasi yang mengambil alih lahan skala luas serta meminimalisir ketersebaran tenaga kerja, semakin menjauhkan akses tenaga kerja muda pada pertanian.

Optimisme Chayanovian di Indonesia akan menemukan dasarnya jika kebijakan agraria dan pertanian lebih berorientasi pada jaminan alat produksi serta pengelolaan pertanian pada masyarakat tani skala rumah tangga. Pengalaman anak muda Lolobata, Gotowasi dan Kulonprogo yang memiliki akses pada alat-produksi, reproduksi kapital serta hasilnya, dan keterbukaan secara luas pada akses pasar (harga) dan informasi, menunjukkan bahwa optimisme tenaga kerja muda pertanian dan dunia pertanian itu sendiri bukanlah mitos namun situasi dari proses-proses yang terus-menerus diciptakan. Di Gotowasi dan Kulonprogo, masyarakat tani kini menghadapi alih fungsi lahan pertanian/kebun menjadi penggunaan baru pertambangan nikel dan besi. Politik alokasi lahan di kedua wilayah juga memberi dukungan pada alih fungsi tersebut. Pendidikan yang ditempuh mereka di perkotaan juga secara berangsur-angsur memberi orientasi keluar (pergi) daripada membuatnya mengkreasikan sumberdaya komunitas dan alamnya dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Menjual tanah untuk penambangan adalah pilihan-pilihan menggoda yang berhasil mereka tentang. Kedua kekuatan baru itu mengancam masa depan generasi muda potensial dan pertanian.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Sensus Pertanian BPS 2013*
 Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi 2011, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, Bandung, KPA Agrarian Resource Center Bina Desa Konsorsium Pembaruan Agraria.
 Bahruddin 2007, *Pendidikan alternatif Qaryah Thayyibah*, Yogyakarta, PT. LKiS Pelangi Aksara.

- Bernstein, Henry 2010, *Class Dynamics of Agrarian Change: Agrarian Change and Peasant Studies*, Initiatives on Critical Agrarian Studies, Fernwood Publishing.
- Cahyono, Eko dkk. 2009, "Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo, dalam, Laksmi A. Savitri, Moh. Shohibuddin, dan Surya Saluang. *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*, STPN Press dan Sajogyo Institute.
- HuMA 2015, "Catatan dari Diskusi dan Sharing Informasi: Program Pertanian Pangan ala Jokowi", Perkumpulan HuMA, Pasar Minggu, Jakarta, 20 Mei 2015.
- Kompas, 12 Juni 2012, "Dirampok Keserakahan dan Kerakusan".
- Li, Tania Murray 2009, "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations", jurnal *Antipode* Vol. 41 No. 5.
- Lukmanurdin, Ibang. tt. <http://pesantrenekologi.blogspot.com/2015/05/rencana-strategis-pesantren-atthathariq.html?m=1>.
- Luthfi, Ahmad Nashih 2012, "Mencari Makna Keseharian dalam Isu Keistimewaan Yogyakarta", makalah Seminar Nasional Reforma Agraria, BPSNT Diknas, Yogyakarta, UC UGM, 11 Juli.
- Novrian, Didi 2012, *Tenurial Assesment in East Halmahera, Catatan Lapang Riset Sajogyo Institute*, Maret 2012.
- Perpres RI, No. 32/2011 tentang MP3EI.
- Ploeg, Jan Douwe van der 2013, *Peasant and The Art of Farming, A Chayanovian Manifesto*, Canada, Fernwood Publishing.
- Saluang, Surya, Didi Novrian, Risman Buamona, Meifita Handayani 2015, *Orang Halmahera Timur dan Tanahnya*, Tanah Air Beta dan Sajogyo Institute.
- Savitri, Laksmi A 2012, "Hidup Kita, Tanah Kita: Hidup Malind dalam Gelombang Pertanian Industrial", Presentasi hasil penelitian oleh Tim SKP-KAM, Sajogyo Institute, dan Komunitas Perfilman Intertekstual.
- Shiddieq, Djafar, Sulakhudin dan BD Kertonegoro 2007, *Optimalisasi Lahan Pasir Pantai Bugel Kulonprogo untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura dengan Teknologi Inovatif Berkearifan Lokal*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Sumberdaya Lahan dan Lingkungan Pertanian, Deptan 8-9 November 2007.
- Tempo, 8 April 2012, "Bom Waktu di Hamparan Tanah Merauke", Investigasi majalah *Tempo*
- Tim Pergerakan, ed. 2005, *Aku Bangga Jadi Anak Desa*, Bandung, Pergerakan.
- Tjandraningsih, Indrasari 2012, "Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Memiskinkan", <http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/perburuhan/134-indrasari-tjandraningsih>, diunduh 09-11-2012.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 2008, *Negara Agraris Ingkari Agraria*, Bogor, KPM IPB bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- White, Ben 2011, "Who Will Own the Countryside: Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming", *Valedictory Lecture, ISS*, 13 October 2011.
- White, Ben 2012, "Changing Childhoods: Javanese Village Children in Three Generations", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 12 No. 1, January.
- Widodo 2013, *Menanam adalah Melawan*, Yogyakarta, Tanah Air Beta.
- Yunus, Muhammad 2007, *Bank Kaum Miskin*, Depok, Marjin Kiri.
- Zoomers, Annelies 2010, "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab", *Journal of Peasant Studies* 37(2).